

# SATUAN ACARA PERKULIAHAN ( S A P )

Mata Kuliah : Kebijakan Pendidikan  
Kode Mata Kuliah : ADM 531  
Bobot SKS : 3  
Semester : 7  
Prasyarat Mata Kuliah : a. Pengelolaan Pendidikan  
b. Perundang-undangan Pendidikan  
Penanggung jawab : Prof. H. Aas Syaefuddin, MA  
Anggota Tim/Asisten \*) : .....  
1. Drs. D. Deni Koswara, M.Pd  
2. Aan Komariah, M.Pd  
3. ....

JURUSAN Adminstrasi Pendidikan  
FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN  
UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA  
1999



Ket. Bentuk Partisipasi:

1. menanggapi jawaban permasalahan yang diajukan dosen/mahasiswa lain
2. bertanya
3. menjawab

Penghargaan:

- ++ : tajam, orsinil, inovatif
- + : tajam, merujuk pada kepustakaan
- 0 : tidak berisi hal-hal esensial
- : bertele-tele dan tidak menjawab permasalahan
- : mementahkan permasalahan

Tagihan: diberikan tugas untuk mencari contoh-contoh pentingnya/ kasus kebijakan pendidikan

E. SUMBER/RUJUKAN

Ali Imran, 1993, Kebijakan Pendidikan di Indonesia, Jakarta, Bumi Aksara

Houg, 1985, Educational Policy, New York: Mc Graw-Hill.

Supandi & Sanusi, 1988, Kebijakan & Keputusan Pendidikan, Depdikbud: Proyek Pengembangan Lembaga Pendidikan  
Tenaga kependidikan

## PERTEMUAN KE 2

### A. POKOK/SUB POKOK BAHASAN

Konsep Kebijakan Pendidikan

### B. TUJUAN INSTRUKSIONAL UMUM

Mahasiswa memahami konsep kebijakan pendidikan

### C. RINCIAN KEGIATAN PERKULIAHAN

| No  | Tujuan Instruksional Khusus  | Uraian Materi Perkuliahan  | Bentuk Perkuliahan   | Media dan Alat           |
|-----|--|--|--|--------------------------|
| (1) | (2)  | (3)  | (4)  | (5)                      |
| 2   | <p>Setelah mempelajari perkuliahan ini diharapkan mahasiswa dapat :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Menjelaskan batasan pendidikan</li> <br/> <li>- Menginventarisir komponen kebijakan pendidikan</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kebijakan diartikan : <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tujuan, program, keputusan, UU, ketentuan-ketentuan, usulan-usulan, rancangan besar.</li> <li>- Kebijakan berdasar ahli : Jones, Pall, William, Dunn, Dyer.</li> <li>- Kebijakan Pendidikan</li> </ul> </li> <br/> <li>• Komponen Kebijakan Pendidikan : <ul style="list-style-type: none"> <li>- Goal, tujuan yang diinginkan.</li> <li>- Plan, atau proposal.</li> <li>- Program</li> <li>- Decision</li> <li>- Effect</li> </ul> </li> </ul> <p>Unsur-unsur dalam batasan</p> | <p>Ceramah, tanya jawab, diskusi</p><br><p>Ceramah, tanya jawab, diskusi, assignment</p> | <p>OHP</p><br><p>OHP</p> |

| No | Tujuan Instruksional Khusus                                   | Uraian Materi Perkuliahan   | Bentuk Perkuliahan                        | Media dan Alat |
|----|---|---|---|----------------|
|    |   | kebijakan : aktor, keadaan yang spesifik, tujuan  |   |                |
|    | - Membedakan kebijakan pendidikan dan kebijakan negara        | Kebijakan negara adalah kebijakan yang ditujukan bagi pengatur masalah-masalah umum/publik dan pendidik merupakan masalah publik.   | Ceramah, tanya jawab, diskusi, assignment | OHP            |
|    | - Menjelaskan keterkaitan system politik kebijakan pendidikan | Sistem politik yang berlaku dalam negara terkait dengan kebijakan yang dibuat termasuk kebijakan pendidikan.<br><ul style="list-style-type: none"> <li>- Pengertian system pendidikan</li> <li>- Sistem politik membentuk dan menghasilkan lembaga-lembaga yang memproduksi kebijakan.</li> <li>- Lembaga-lembaga politik : Rule making, application of rule, statement of dyspites.</li> </ul> | Ceramah, responsi, assignment             | OHP            |
|    | - Mengkatagorikan tingkat-tingka kebijakan pendidikan         | Tingkat kebijakan :<br><ul style="list-style-type: none"> <li>- National policy level</li> <li>- General policy level</li> <li>- Special policy level</li> <li>- Technical policy level</li> </ul>  | Ceramah, responsi                         | OHP            |

#### D. RENCANA EVALUASI / TAGIHAN

Tanya jawab tentang konsep kebijakan pendidikan.

Membuat tugas mengumpulkan dan menganalisis konsep kebijakan pendidikan menurut para ahli

#### E. SUMBER/RUJUKAN

Solihin Abdul Wahab (1997), Analisis Kebijakan, dari formulasi ke implementasi kebijakan negara, Jakarta, Bumi Aksara

M. Irfan Islami, (1997), Prinsip-prinsip perumusan kebijakan negara, Bumi Aksara, Jakarta.

Dun Willim (1981) Public Policy Analysis; An Introduction, New York, Prentice-Hall, Inc.

PERTEMUAN KE 3

A. POKOK/SUB POKOK BAHASAN

Perumusan dan Pengesahan Kebijakan

B. TUJUAN INSTRUKSIONAL UMUM

Mahasiswa memahami perumusan dan pengesahan kebijakan pendidikan

C. RINCIAN KEGIATAN PERKULIAHAN

| No<br>(1) | Tujuan Instruksional Khusus<br>(2)   | Uraian Materi Perkuliahan<br>(3)  | Bentuk Perkuliahan<br>(4)   | Media dan Alat<br>(5) |
|-----------|--|---|---|-----------------------|
| 3         | <p>Setelah mempelajari pokok bahasan ini diharapkan mahasiswa dapat :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Menjelaskan proses perumusan kebijakan</li> <li>- Menjelaskan pengesahan kebijakan.</li> <li>- Menyebutkan factor-faktor perumusan kebijakan.</li> <li>- Mengidentifikasi lingkungan kebijakan pendidikan</li> <li>- Mengidentifikasi Masalah dan agenda kebijakan pendidikan.</li> <li>- Menjelaskan alasan</li> </ul> | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Proses perumusan kebijakan : Perumusan , Penyusunan Agenda, Membuat proposal, Pengesahan rumusan.</li> <li>2. Pengesahan kebijakan merupakan legalitas yang mengikat.</li> <li>3. Aktor-aktor perumusan kebijakan : Eksekutif, legislative, Administrator, Parpol, Interst group, Organisasi Masa, Perguruan Tinggi, Tokoh perorangan.</li> <li>4. Lingkungan kebijakan pendidikan : Kondisi Sumber, Iklim, Demografi, Budaya politik, Struktur Sosial, Kondisi Sosial Ekonomi.</li> <li>5. Membedakan fenomena, gejala, masalah.</li> <li>6. Masalah kebijakan terdiri atas</li> </ol> | <p>Ceramah,<br/>tanyajawab,responsi,assignment, diskusi kecil</p> | <p>OHP</p>            |

| No | Tujuan Instruksional Khusus   | Uraian Materi Perkuliahan  | Bentuk Perkuliahan | Media dan Alat |
|----|---|--|--------------------|----------------|
|    | <p>perluanya pengesahan.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Menjelaskan batasan legimitasi</li> <li>- Merinci proses pengesahan kebijakan pendidikan</li> <li>- Mengidentifikasi problem-problem pengesahan kebijakan.</li> </ul> | <p>masalah prosedural, substansial dan masalah distributive.</p> <p>7. Agenda kebijakan adalah masalah-masalah dengan syarat-syarat : Sifat luar biasa, berkaitan dengan kepentingan penguasa, diaungkap oleh media masa</p> <p>8. Perluanya pengakuan dari masyarakat.</p> <p>9. Tanggungjawab atas hasil pelaksanaan.</p> <p>Legitimasi menyangkut dua makna :</p> <p>10. Pemberian kewenangan untuk memberikan usulan</p> <p>11. Memberikan kewenangan untuk melaksanakan proposal yang diusulkan.</p> <p>Proses pengesahan melalui :<br/>Rakyat langsung, tokoh-tokoh kunci masyarakat, koalisi.</p> <p>Problema :<br/>Resistensi dari eksekutif aktif, resistensi dari kelompok konservatif, dampak dari eks aktif kelompok konservatif, resistensi dari kelompok yang punya visi, persepsi dan kepentingan yang berbeda.</p> |                    |                |

**D. RENCANA EVALUASI / TAGIHAN**

Evaluasi dilakukan secara lisan tentang topik/pokok bahasan.

Membuat resume hasil perkuliahan.

#### E. SUMBER/RUJUKAN

Solihin Abdul Wahab (1997), Analisis Kebijakan, dari formulasi ke implementasi kebijakan negara, Jakarta, Bumi Aksara  
M. Irfan Islami, (1997), Prinsip-prinsip perumusan kebijakan negara, Bumi Aksara, Jakarta.  
Dun Willim (1981) Public Policy Analysis; An Introduction, New York, Prentice-Hall, Inc.

PERTEMUAN KE 4

A. POKOK/SUB POKOK BAHASAN  
 Sosialisasi kebijakan pendidikan

B. TUJUAN INSTRUKSIONAL UMUM  
 Mahasiswa memahami dan memiliki keterampilan komunikasi kebijakan pendidikan.

.....

C. RINCIAN KEGIATAN PERKULIAHAN

| No  | Tujuan Instruksional Khusus  | Uraian Materi Perkuliahan  | Bentuk Perkuliahan | Media dan Alat |
|-----|--|--|--------------------|----------------|
| (1) | (2)  | (3)  | (4)                | (5)            |
| 4   | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Menjelaskan Alasan-alasan perlunya komunikasi kebijakan pendidikan.</li> <li>- Mendefinisikan komunikasi kebijakan pendidikan</li> <li>- Menjelaskan model komunikasi kebijakan pendidikan.</li> <li>- Mengidentifikasi problema kebijakan pendidikan.</li> </ul> | <p>Alasan : Tidak terjadi barrier, terbentuk permasalahan, efektifitas pelaksanaan.</p> <p>Sosialisasi atas rumusan-rumusan kebijakan pendidikan yang sudah dilegimitasi.</p> <p>Model komunikasi : satu arah/top down, interaksi, transaksi.</p> <p>Problem komunikasi :Berasal dari komunikator, dari pesannya</p> |                    |                |

D. RENCANA EVALUASI / TAGIHAN

Bentuk tes lisan,  
 Jenis Tes Pertanyaan-pertanyaan seputar topik.  
 Resume hasil perkuliahan pertemuan ke empat.

E. SUMBER/RUJUKAN

Solihin Abdul Wahab (1997), Analisis Kebijakan, dari formulasi ke implementasi kebijakan negara, Jakarta, Bumi Aksara'

M. Irfan Islami, (1997), Prinsip-prinsip perumusan kebijakan negara, Bumi Aksara, Jakarta.

Dun Willim (1981) Public Policy Analysis; An Introduction, New York, Prentice-Hall, Inc.

PERTEMUAN KE 5

A. POKOK/SUB POKOK BAHASAN

Implementasi kebijakan pendidikan

B. TUJUAN INSTRUKSIONAL UMUM

Mahasiswa memahami konsep dan memiliki kemampuan mengimplementasikan kebijakan pendidikan dengan baik.

C. RINCIAN KEGIATAN PERKULIAHAN

| No  | Tujuan Instruksional Khusus   | Uraian Materi Perkuliahan   | Bentuk Perkuliahan            | Media dan Alat |
|-----|---|---|-------------------------------|----------------|
| (1) | (2)   | (3)   | (4)                           | (5)            |
| 5   | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Mendefinisikan implementasi kebijakan pendidikan</li> <li>- Mengidentifikasi aktor-aktor pelaksana kebijakan pendidikan.</li> <li>- Menjelaskan arena kebijakan pendidikan</li> <li>- Menjelaskan jenis-jenis kebijakan pendidikan.</li> </ul> | <p>Implementasi merupakan pengupayaan agar rumusan-rumusan kebijakan pendidikan berlaku didalam praktek</p> <p>Aktor-aktor : Perumus kebijakn, pelaksana, mediator, parpol, interst group, ormas, tokoh perorangan, media masa.</p> <p>Arena pelaksana kebijakan merupakan wewenang yang terdiri atas: wewenang tradisional, legal-rasional/birokratis, karismatik.</p> <p>Jenis kebijakan : Substantive policies, procedural policies, distributive policies, redistributive policies, regulatory policies, self regulatory policies, material policies, symbolic policies, collective policies, private good policies, liberal policies, conservative policies.</p> | Ceramah, responsi, assignment | OHP            |

| No | Tujuan Instruksional Khusus   | Uraian Materi Perkuliahan   | Bentuk Perkuliahan | Media dan Alat |
|----|---|---|--------------------|----------------|
|    | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Menjelaskan factor-faktor yang berpengaruh dalam implementasi kebijakan pendidikan.</li> <li>- Menjelaskan hubungan antara pembuat kebijakan dengan pelaksanaan kebijakan.</li> <li>- Menjelaskan pendekatan-pendekatan pelaksana kebijakan pendidikan.</li> </ul> | <p>Faktor-faktor yang berpengaruh :<br/>Kompleksitas kebutuhan, Ketidakjelasan masalah kebijakan, sumber-sumber potensial, keahlian pelaksana kebijakan, dukungan dari kelompok sasaran, factor efektifitas-efisiensi birokrasi.</p> <p>Ada empat model hubungan :<br/>Teknokratis, Utusan yang diberi wewenang, penjual dan pembeli, wiraswasta birokratis.</p> <p>Empat pendekatan yang digunakan :<br/>Struktural, prosedural/manajerial, keperilakuan, politik.</p> |                    |                |

D. RENCANA EVALUASI / TAGIHAN

Evaluasi dalam bentuk lisan dengan format sbb :

| No | Nama Mahasiswa | Bentuk Partisipasi |   |   | Penghargaan |   |   |   |    |
|----|----------------|--------------------|---|---|-------------|---|---|---|----|
|    |                | 1                  | 2 | 3 | ++          | + | 0 | - | -- |
|    |                |                    |   |   |             |   |   |   |    |

Ket : 1=menanggapi 2= bertanya 3= menjawab

++= Tajam,orisinil,inovatif +=tajam,orisinil 0=Konvensional/tidak berisi hal esensial

-= bertele-tele dan tidak tepat --=mementahkan permasalahan.

Resume hasil perkuliahan.

E. SUMBER/RUJUKAN

Solihin Abdul Wahab (1997), Analisis Kebijakan, dari formulasi ke implementasi kebijakan negara, Jakarta, Bumi Aksara

M.Irfan Islami, (1997), Prinsip-prinsip perumusan kebijakan negara, Bumi Aksara, Jakarta.

Dun Willim (1981) Public Policy Analysis; An Introduction, New York, Prentice-Hall, Inc.

PERTEMUAN KE 6

A. POKOK/SUB POKOK BAHASAN

Pendekatan/Metode analisis kebijakan.

B. TUJUAN INSTRUKSIONAL UMUM

Memahami pendekatan dalam analisis kebijakan pendidikan dan dapat menerapkannya dalam menganalisis kebijakan pendidikan.

C. RINCIAN KEGIATAN PERKULIAHAN

| No  | Tujuan Instruksional Khusus   | Uraian Materi Perkuliahan   | Bentuk Perkuliahan             | Media dan Alat |
|-----|---|---|--------------------------------|----------------|
| (1) | (2)   | (3)   | (4)                            | (5)            |
| 6   | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Mahasiswa dapat menjelaskan pendekatan empiris</li> <br/> <li>- Menjelaskan pendekatan/metode evaluative</li> <br/> <li>- Menjelaskan pendekatan/metode normative/deskriptif.</li> </ul> | <p>Suatu prosedur atau cara yang digunakan oleh penelitian dalam ilmu pengetahuan untuk menerangkan sesuatu gejala yang terjadi didalam masyarakat.</p> <p>Menerangkan apa adanya hasil dari suatu upaya yang dilakukan oleh suatu program dengan menggunakan criteria.</p> <p>Menawarkan suatu norma/kaidah atau resep yang dapat digunakan oleh pemakai dalam rangka memecahkan masalah. Pendekatan normative untuk membantu para pengambil keputusan dalam memberikan gagasan hasil pemikiran yang dapat digunakan untuk memecahkan masalah kebijakan.</p> | Ceramah, responsi, assignment. | OHP            |

D. RENCANA EVALUASI / TAGIHAN

Sama dengan pertemuan ke lima

Tagihan ; membuat resume hasil perkuliahan dan menganalisis satu kebijakan berdasarkan salah satu pendekatan.

E. SUMBER/RUJUKAN

Solihin Abdul Wahab (1997), Analisis Kebijakan, dari formulasi ke implementasi kebijakan negara, Jakarta, Bumi Aksara'

M.Irfan Islami, (1997), Prinsip-prinsip perumusan kebijakan negara, Bumi Aksara, Jakarta.

Dun Willim (1981) Public Policy Analysis; An Introduction, New York, Prentice-Hall, Inc.

## PERTEMUAN KE 7

### A. POKOK/SUB POKOK BAHASAN

Proses analisis kebijakan.

### B. TUJUAN INSTRUKSIONAL UMUM

Mahasiswa menguasai dan memiliki kemampuan dalam proses analisis kebijakan pendidikan

### C. RINCIAN KEGIATAN PERKULIAHAN

| No  | Tujuan Instruksional Khusus                                       | Uraian Materi Perkuliahan   | Bentuk Perkuliahan             | Media dan Alat |
|-----|---|---|--------------------------------|----------------|
| (1) | (2)   | (3)   | (4)                            | (5)            |
| 7   | Mahasiswa dapat menjelaskan proses analisis kebijakan pendidikan. | Proses analisis kebijakan terdiri atas :<br>Perumusan masalah, pemantauan, prakiraan, evaluasi, rekomendasi, pengumpulan praktis. | Ceramah, responsi, assignment. | OHP            |

### D. RENCANA EVALUASI / TAGIHAN

Idem dengan pertemuan ke enam

Tagihan ; membuat makalah berisi analisis kebijakan tentang kebijakan pendidikan yang telah dikeluarkan.

### E. SUMBER/RUJUKAN

.....  
Ace Suryadi, HAR Tilaar(1993), Analisis kebijakan pendidikan, PT.Remadja Rosdakarya, Bandung.

Ary H,Gunawan(1986), Kebijakan pendidikan di Indonesia;Proses Produk,dan masa depannya, Depdikbud, Jakarta.

PERTEMUAN KE 8

A. POKOK/SUB POKOK BAHASAN

Evaluasi kebijakan pendidikan

B. TUJUAN INSTRUKSIONAL UMUM

Mahasiswa memiliki kemampuan dalam mengevaluasi kebijakan pendidikan

C. RINCIAN KEGIATAN PERKULIAHAN

| No<br>(1) | Tujuan Instruksional Khusus<br>(2)   | Uraian Materi Perkuliahan<br>(3)   | Bentuk Perkuliahan<br>(4)     | Media dan Alat<br>(5) |
|-----------|--|--|-------------------------------|-----------------------|
| 8         | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Menunjukkan alasan kebijakan pendidikan</li> <li>- Mendefinisikan evaluasi kebijakan pendidikan</li> <li>- Menjelaskan macam-macam evaluasi kebijakan pendidikan</li> </ul> | <p>Alasan evaluasi sesuai dengan tujuan/maksud dari evaluasi : mengetahui hal-hal yang telah dirumuskan dapat dilaksanakan atau tidak, berhasil atau belum, kelebihan/kekurangannya, implementasinya, dampaknya, resiko-resikonya, langkah-langkah perbaikannya.</p> <p>Suatu aktivitas yang bermaksud untuk mengetahui seberapa jauh suatu kebijakan pendidikan tersebut benar-benar sesuai dengan criteria-kriteria yang telah ditetapkan serta memberikan dampak nyata terhadap khalayak sesuai dengan yang diinginkan.</p> <p>Waktu: (linier, komprehensif)<br/>substansi: (dasar, menengah, dikti)<br/>Periodisasi Evaluasi : (repetitif ke enam)</p> | Ceramah, Responsi, Assignment | OHP                   |

| No | Tujuan Instruksional Khusus   | Uraian Materi Perkuliahan   | Bentuk Perkuliahan | Media dan Alat |
|----|---|---|--------------------|----------------|
|    | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Menjelaskan karakteris evaluasi kebijakan pendidikan</li> <li>- Menginventarisir vaktor-vaktor evaluasi kebijakan pendidikan</li> <li>- Mengidentifikasi problem-problem evaluasi kebijakan pendidikan.</li> </ul> | <p>tahun pertama, kedua, ketiga dst.<br/>           Kriteria (Standar, Normatif)<br/>           Sasaran (Proses, Dampak)<br/>           Kontinuitas (Formatif, Sumatif)<br/>           Berdasar ahli (Anderson : Impresionistis, Operasional, Sistematis. Dunn : Semu, Resmi, Teori keputusan)</p> <p>Karakteristik ( Tak bebas nilai, berorientasi pada masalah, berorientasi masa lalu dan sekarang, berorientasi pada dampak)</p> <p>Aktor formal dan non formal</p> <p>Problem : tidak jelas, cepatnya perkembangan masyarakat yang menjadi sasaran, tidak jelas masalah, sumber-sumber gejala masalah, terkaitnya masalah satu dengan yang lainnya, subyektifitas masalah kebijakan.</p> |                    |                |

D. RENCANA EVALUASI / TAGIHAN  
 idem

E. SUMBER/RUJUKAN  
 Idem

## PERTEMUAN KE 9

A. POKOK/SUB POKOK BAHASAN  
Perkembangan histories

B. TUJUAN INSTRUKSIONAL UMUM

.....  
Mahasiswa memahami perkembangan histories kebijakan pendidikan di Indonesia

C. RINCIAN KEGIATAN PERKULIAHAN

| No  | Tujuan Instruksional Khusus  | Uraian Materi Perkuliahan   | Bentuk Perkuliahan               | Media dan Alat |
|-----|--|---|----------------------------------|----------------|
| (1) | (2)  | (3)   | (4)                              | (5)            |
| 9   | <ul style="list-style-type: none"><li>- Mengidentifikasi kebijakan pendidikan zaman belanda</li><li>- Mengidentifikasi kebijakan pendidikan zaman jepang</li><li>- Mengidentifikasi kebijakan pendidikan zaman kemerdekaan</li></ul> | <p>Produk kebijakan zaman belanda</p> <p>Produk kebijakan zaman jepang</p> <p>Produk kebijakan zaman kemerdekaan :<br/>UU No.4/1950 jo UU No.12/1954<br/>UU No.2/1989 dan PP-nya.</p> | Veramah, responsi,<br>assignment | OHP            |

D. RENCANA EVALUASI / TAGIHAN

Idem

E. SUMBER/RUJUKAN

Idem

PERTEMUAN KE 10

A. POKOK/SUB POKOK BAHASAN

Kebijakan pokok pembangunan nasional

B. TUJUAN INSTRUKSIONAL UMUM

.....  
Mahasiswa memahami kebijakan pokok pembangunan nasional.

C. RINCIAN KEGIATAN PERKULIAHAN

| No  | Tujuan Instruksional Khusus                      | Uraian Materi Perkuliahan   | Bentuk Perkuliahan            | Media dan Alat |
|-----|--|---|-------------------------------|----------------|
| (1) | (2)  | (3)   | (4)                           | (5)            |
| 10  | Menjelaskan kebijakan pokok pembangunan nasional | <ul style="list-style-type: none"><li>- Pemerataan</li><li>- Efisiensi</li><li>- Kualitas</li><li>- Efisiensi</li></ul> | Veramah, responsi, assignment | OHP            |

D. RENCANA EVALUASI / TAGIHAN

Idem

E. SUMBER/RUJUKAN

Idem

## PERTEMUAN KE 11

### A. POKOK/SUB POKOK BAHASAN

Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun

### B. TUJUAN INSTRUKSIONAL UMUM

mahasiswa memahami kebijakan wajib belajar sembilan tahun

### C. RINCIAN KEGIATAN PERKULIAHAN

| No  | Tujuan Instruksional Khusus  | Uraian Materi Perkuliahan  | Bentuk Perkuliahan | Media dan Alat |
|-----|--|--|--------------------|----------------|
| (1) | (2)  | (3)  | (4)                | (5)            |
| 11  | <ul style="list-style-type: none"><li>- Menjelaskan konsep wajib belajar</li><li>- Menganalisis kebijakan wajib belajar sembilan tahun</li></ul> | Wajib belajar pendidikan dasar adalah kewajiban belajar pada SD da SLTP<br>Evaluasi terhadap perumusan wajib belajar, implementasi dan dampaknya terhadap pembangunan pendidikan kita. | Diskusi            | OHP<br>Makalah |

### D. RENCANA EVALUASI / TAGIHAN

Evaluasi Makalah dan Presentasi

### E. SUMBER/RUJUKAN

Idem

Kebijakan Wajar dikdas sembilan tahun

UU No.2/1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional beserta peraturan pelaksanaannya.

## PERTEMUAN KE 12

### A. POKOK/SUB POKOK BAHASAN

Otonomi Daerah dalam bidang Pendidikan

### B. TUJUAN INSTRUKSIONAL UMUM

.....  
mahasiswa dapat menganalisis kebijakan otda dalam bidang pendidikan.

### C. RINCIAN KEGIATAN PERKULIAHAN

| No  | Tujuan Instruksional Khusus   | Uraian Materi Perkuliahan  | Bentuk Perkuliahan | Media dan Alat |
|-----|---|--|--------------------|----------------|
| (1) | (2)   | (3)  | (4)                | (5)            |
| 12  | <ul style="list-style-type: none"><li>- Menjelaskan konsep Otonomi daerah</li><li>- Menganalisis kebijakan Otda dalam bidang pendidikan</li></ul> | <p>Pengertian mekanisme dan distribusi proses authority</p> <p>Evaluasi terhadap kebijakan Otda mulai dari rumusan, implementasi sampai evaluasi Otda.</p> | Diskusi            | OHP<br>Makalah |

### D. RENCANA EVALUASI / TAGIHAN

Evaluasi Makalah dan Presentasi

### E. SUMBER/RUJUKAN

Idem

Hadari Nawawi, Kebijakan pendidikan di Indonesia ditinjau dari sudut hukum, Gajahmada University Press

PERTEMUAN KE 13

A. POKOK/SUB POKOK BAHASAN

Link and Match pada SD, SLTP, SMU

B. TUJUAN INSTRUKSIONAL UMUM

.....  
mahasiswa dapat memahami dan menganalisis kebijakan link and match pada SD,SLTP,SMU.

C. RINCIAN KEGIATAN PERKULIAHAN

| No  | Tujuan Instruksional Khusus   | Uraian Materi Perkuliahan  | Bentuk Perkuliahan | Media dan Alat |
|-----|---|--|--------------------|----------------|
| (1) | (2)   | (3)  | (4)                | (5)            |
| 13  | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Menjelaskan konsep link and match</li> <br/> <li>- Menganalisis kebijakan link and match pada SD,SLTP,SMU</li> </ul> | <p>Link berkaitan dengan tujuan pendidikan tiap jenjang dengan jenjang selanjutnya. Match berkaitan dengan kesepadanan antara tujuan dengan relevansinya dengan kemajuan.</p> <p>Analisis terhadap kebijakan Link and Match terutama pada implementasinya.</p> | Diskusi            | OHP<br>Makalah |

D. RENCANA EVALUASI / TAGIHAN

Evaluasi Makalah dan Presentasi

E. SUMBER/RUJUKAN

Idem

## PERTEMUAN KE 14

A. POKOK/SUB POKOK BAHASAN  
Ujian Sekolah dan Ujian Negara

B. TUJUAN INSTRUKSIONAL UMUM

.....  
Mahasiswa dapat memahami dan menganalisis EBTANAS.

C. RINCIAN KEGIATAN PERKULIAHAN

| No  | Tujuan Instruksional Khusus  | Uraian Materi Perkuliahan  | Bentuk Perkuliahan | Media dan Alat |
|-----|--|--|--------------------|----------------|
| (1) | (2)  | (3)  | (4)                | (5)            |
| 13  | <ul style="list-style-type: none"><li>- Menjelaskan kebijakan Ebtanas</li><li>- Menganalisis implementasi kebijakan EBTANAS</li><li>- Menganalisis dampak kebijakan EBTANAS terhadap mutu pendidikan</li></ul> | <p>Kebijakan EBTANAS adalah kebijakan penilaian akhir yang distandarisasi secara nasional</p> <p>Analisis implementasi kebijakan : Keberhasilan, kelemahan dan factor-faktor yang mempengaruhinya.</p> <p>Analisis Dampaknya pada peningkatan mutu pendidikan.</p> | Diskusi            | OHP<br>Makalah |

D. RENCANA EVALUASI / TAGIHAN

Evaluasi Makalah dan Presentasi

E. SUMBER/RUJUKAN

Himpunan peraturan EBTA/EBTANAS tahun pelajaran 1995/1996

Oejeng Soewarno, Oteng Sutisna, Moh.Suhud (1974), Masalah-masalah Ujian Negara dan Ujian Sekolah, Ganaco NV, Bandung.

